

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara bisnis dan masyarakat. Menurut teori legitimasi, bisnis hanya akan berjalan apabila sebuah bisnis diakui oleh masyarakat dan beroperasi dengan sistem nilai yang sesuai dengan nilai di masyarakat (Rankin *et al.*, 2018). Nilai dan norma dalam teori legitimasi telah berubah, pada masa lalu legitimasi dianggap hanya dari segi kinerja ekonomi dengan harapan bisnis menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Namun sekarang bisnis diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai masalah termasuk konsekuensi lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka. Perusahaan yang memperhatikan masalah lingkungan dan sosial akan terlibat dalam aktivitas pengungkapan laporan keberlanjutan.

Perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan keberlanjutan akan mengancam legitimasi dimana masyarakat tidak akan memercayai perusahaan tersebut sehingga keberlangsungan perusahaan juga terancam. Maka pelaporan keberlanjutan dengan mekanisme yang memperhatikan sosial, lingkungan, dan tata kelola penting. Hal tersebut membuat perusahaan menjadi *legitimate* dan dipercayai oleh masyarakat bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas usaha dengan bertanggung jawab.

2.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan adalah teori yang membahas komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (Rankin *et al.*, 2018). Pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori pemangku kepentingan juga mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungan sendiri melainkan harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya. Seperti teori legitimasi, teori pemangku kepentingan telah digunakan untuk mementingkan pengungkapan informasi sukarela kepada pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan. Perusahaan akan memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai aktivitas perusahaan dalam proses pengambilan keputusan sehingga *stakeholder* akan memberikan dukungan terhadap perusahaan.

Permasalahan di teori pemangku kepentingan muncul karena bisnis sering memberikan prioritas pada kepentingan beberapa pemangku kepentingan tertentu, dan mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya dalam prosesnya. Untuk menghindari permasalahan di teori pemangku kepentingan, perusahaan harus memenuhi tuntutan dari pemangku kepentingan, perusahaan harus menjaga hubungan mereka dengan pemangku kepentingan seperti menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja dan aktivitas bisnis baik keuangan maupun non keuangan. Peningkatan kepedulian *stakeholder* terhadap isu sosial dan lingkungan akan membuat perusahaan peduli dengan pengungkapan keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ESG dan mengungkapkan laporan

keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip ESG adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan.

2.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2008), definisi pengungkapan adalah:

“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements.”

Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan pengungkapan adalah memberikan dan menyajikan informasi tambahan terkait laporan didalam laporan keuangan. Pengungkapan secara umum bertujuan untuk melayani pihak yang memiliki kepentingan dengan menyajikan informasi yang diperlukan (Suwardjono, 2008). Sifat dalam pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan tanpa adanya kewajiban dari standar akuntansi maupun peraturan badan pengawas adalah pengungkapan sukarela sedangkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan disertai kewajiban dari standar akuntansi atau peraturan badan pengawas adalah pengungkapan wajib. Bentuk pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka adalah melakukan publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan

2.4 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, pada kondisi seperti saat ini banyak

stakeholder yang mulai mementingkan faktor non-keuangan perusahaan seperti keberlanjutan perusahaan dan kepedulian pada bidang lingkungan. Dengan semakin pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi bisnis, pelaporan kinerja berkelanjutan juga meningkat. Laporan keberlanjutan mengacu pada laporan yang memberikan informasi mengenai aktivitas nilai lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai sebuah perusahaan, sehingga perusahaan tidak hanya menyajikan informasi terkait ekonominya. Istilah digunakan untuk laporan keberlanjutan sudah banyak digunakan sejak dahulu berupa pelaporan sosial perusahaan, laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), laporan *triple bottom line*, laporan keberlanjutan, laporan lingkungan, audit sosial, laporan *environment, social, governance* (ESG) dan laporan *stakeholder*. Banyak dari istilah ini digunakan secara bergantian (Rankin *et al.*, 2018).

Berbagai istilah digunakan untuk pelaporan keberlanjutan salah satunya pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Meskipun istilah pelaporan keberlanjutan *triple bottom line* umum digunakan hingga sekitar tahun 2006 dan ESG tampaknya muncul sebagai istilah yang lebih menonjol (Rankin *et al.*, 2018). Sejarah terbentuknya ESG dunia berawal dari cita-cita dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada momen perkumpulan PBB tercipta dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainability Development*. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibentuk konsep ESG yang akan dijalankan oleh perusahaan untuk pembangunan keberlanjutan perusahaan. Indonesia telah merespon kebutuhan pembangunan berkelanjutan dengan menerbitkan *Roadmap*

Keuangan Berkelanjutan Tahap II melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menerapkan aspek *Environment, Social, and Governance* (ESG) ke dalam seluruh kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan fokus membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif merupakan salah satu tujuan rencana strategis (SDGs, 2021). *Environment, Social, and Governance* (ESG) adalah standar pelaporan keberlanjutan sebuah perusahaan yang memperhatikan tiga faktor utama yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Faktor lingkungan berkaitan dengan interaksi perusahaan atau industri dengan lingkungan secara langsung. Faktor sosial menyangkut dampak sosial dari perusahaan terhadap masyarakat atau komunitas. Faktor tata kelola berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan diatur (FSCO, 2016). ESG sekarang dianggap sebagai komponen penting dari keberlanjutan perusahaan atau tanggung jawab sosial. Indikator ESG dapat digunakan untuk menilai keterampilan manajemen perusahaan karena akan menangkap lebih banyak data non keuangan tentang lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Galbreath, 2013). ESG tampaknya melibatkan kriteria investor untuk menilai penggunaan perusahaan atau korporasi untuk melaksanakan CSR (Rau dan Yu, 2023). Menurut Cini dan Ricci (2018) ESG tetap menjadi ukuran terbaik yang tersedia untuk mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4.1 Integrasi Laporan Keberlanjutan Internasional

Pelaporan terintegrasi adalah inisiatif terbaru yang dirancang untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan dan mengintegrasikannya dengan pelaporan keuangan dan tata kelola (pelaporan tentang aturan, proses, dan undang-undang di

mana organisasi beroperasi atau diatur). Pedoman yang berbeda telah muncul untuk memberikan arahan tentang pelaporan berkelanjutan yang tepat. Membuat pelaporan terintegrasi adalah tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB membuat salah satu pedoman yaitu *UN Global Compact*, sebuah inisiatif kebijakan strategis untuk bisnis yang selaras dengan cita-cita di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi untuk menyelaraskan operasi dan strategi mereka. Kemudian Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), pada tahun 2008, menghasilkan panduan tentang penggunaan indikator keberlanjutan dalam laporan tahunan. Dokumen tersebut dikembangkan dengan mengacu pada GRI dan IFRS bertujuan untuk memberikan panduan terperinci tentang penyusunan laporan dengan menggunakan indikator-indikator terpilih (Rankin *et al.*, 2018).

Selain pedoman dari PBB, pedoman yang paling dikenal luas secara global disediakan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI diluncurkan pada tahun 1997 sebagai inisiatif untuk mengembangkan kerangka pelaporan yang diterima secara global untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Laporan berbasis standar GRI dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan menilai seberapa baik kinerja organisasi terkait dengan peraturan, standar, dan pelaporan sukarela (Rankin *et al.*, 2018). Organisasi biasanya menyertakan detail tentang kinerja dan dampak kerusakan di bidang sosial dan lingkungan saat melaporkannya sebagai terpisah dari laporan tahunan yaitu dalam laporan keberlanjutan, laporan CSR, atau laporan ESG.

2.4.2 Regulasi Laporan Keberlanjutan di Indonesia

Indonesia sendiri memiliki beberapa aturan yang diterbitkan oleh OJK maupun pemerintah mengenai pelaporan keberlanjutan. Otoritas Jasa Keuangan Nomor menerbitkan POJK 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. POJK 51 tahun 2017 pasal 10 menyatakan perusahaan wajib menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan yang diumumkan kepada masyarakat mencakup kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup berguna untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan akan menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib untuk melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan akan diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban pelaporan. Semakin pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi bisnis, pelaporan kinerja berkelanjutan juga meningkat.

Laporan keberlanjutan wajib disusun dan memuat aspek lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan masyarakat serta tanggung jawab

produk. Walaupun laporan keberlanjutan wajib disusun oleh perusahaan, namun belum ada peraturan yang mengatur tentang item-item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, sehingga pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan bersifat sukarela. Pada saat ini pedoman pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia menggunakan standar internasional. Standar yang banyak digunakan di Indonesia adalah *GRI Guidelines*. *GRI* dibuat oleh *Global Reporting Initiatives* dengan tujuan mencapai ekonomi global yang berkelanjutan melalui standar keberlanjutan.

2.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah adalah sistem tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan yang mengatur interaksi antara dewan komisaris, dewan direksi, dan komite perusahaan dalam rangka mengelola tata kelola yang baik dan mencapai tujuan perusahaan yang telah disusun sebelumnya (FCGI, 2002). Salah satu elemen dasar dari sistem ekonomi pasar adalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang mengimplementasikannya maupun terhadap keadaan bisnis di suatu negara. Penerapan GCG mendorong berkembangnya persaingan yang sehat dan lingkungan usaha yang kondusif. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sangat penting bagi dunia usaha di Indonesia untuk menerapkan GCG (KNKG, 2006). Perusahaan dengan praktik tata kelola perusahaan yang kuat dan baik berada dalam posisi yang lebih baik. Perusahaan dengan *corporate governance* efektif menjamin bahwa perusahaan dikelola dengan baik sehingga memperoleh keunggulan kompetitif dalam konteks

persaingan bisnis dan modal yang semakin berkembang. Lima prinsip dasar *corporate governance* yang harus diterapkan perusahaan menurut (KNKG, 2006) adalah:

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu dalam proses pengambilan keputusan dilakukan dengan proses yang terbuka terutama dalam mengungkapkan informasi material perusahaan.
2. Kemandirian (*Independence*), yaitu keadaan perusahaan dikelola tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Dikelola secara profesional dan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu pengelolaan perusahaan secara efektif dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu pengelolaan perusahaan dengan prinsip ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip perusahaan sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good Corporate Governance terdiri dari mekanisme-mekanisme yang dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik di sebuah perusahaan. Mekanisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

2.5.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi seperti reksadana, asuransi, institusi keuangan dan sekuritas lainnya (Pirzada *et al.*, 2015). Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual karena ada pendapat bahwa investor institusional sebagai investor yang berpengalaman (Marsinah, 2021). Keberadaan institusional berpotensi menjadi alat pengawasan yang ampuh bagi bisnis. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan, seperti kemampuan menganalisis informasi secara profesional dan mengukur keandalannya. Kepemilikan institusional juga sangat termotivasi untuk menegakkan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasi internal perusahaan. Secara umum, kepemilikan saham institusional dapat mengurangi masalah keagenan dalam bisnis. Jika pemegang saham memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang bisnis dan keuangan, fungsi kontrol akan lebih efektif (Pangeran dan Salaunaung, 2017).

2.5.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yaitu dewan direksi dan dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Wahidawati, 2002). Kepemilikan manajerial adalah suatu keadaan dimana manajer berpartisipasi dalam struktur modal perusahaan, atau alternatifnya, manajer memiliki peran ganda sebagai manajer dan pemegang saham pada perusahaan (Sugiarto, 2002). Sebagai salah satu bagian dari perusahaan, kepemilikan manajerial akan memengaruhi keputusan yang diambil

oleh manajemen dalam jalannya perusahaan. Manajerial dalam perusahaan akan termotivasi untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan dan image perusahaan didepan publik karena berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Manajer tentu akan mengambil keputusan yang bersifat positif untuk keberlangsungan perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong kinerja *corporate governance* yang optimal di perusahaan.

2.5.3 Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota lainnya yang berasal dari luar emiten. Komite Audit pada umumnya bertanggung jawab atas tiga bidang, termasuk pelaporan keuangan, yang mencakup bahwa laporan keuangan secara akurat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, hasil operasional, serta rencana dan komitmen jangka panjang (Pangeran dan Salaunaung, 2017). Komite Audit harus terdiri dari orang-orang yang dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan tidak terlibat dalam operasi sehari-hari manajemen yang mengelola perusahaan. Karena orang yang independen lebih cenderung bersikap adil, tidak memihak, dan objektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya adalah menjaga integritas dan objektivitas dalam penilaian laporan serta penyusunan rekomendasi oleh komite audit (FCGI, 2002). Komite audit diketuai oleh dewan komisaris, dewan komisaris akan menerima laporan dan pertanggungjawaban langsung dari komite audit. Sehingga tugas pengawasan

komite audit harus efektif untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG, yang akan mendorong bisnis untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris sebagai pihak yang memerintah dan mendelegasikan komite audit akan menerima laporan langsung dari Komite Audit. Secara umum jika tugas dan tanggung jawab komite audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip GCG yang akan mendorong bisnis untuk selalu bertanggung jawab dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Sari (2021) mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, manajemen laba, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Jia *et al.*, (2022) mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja ESG di perusahaan China. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi memiliki kinerja ESG yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jimantoro *et al.*, 2023) mengenai pengaruh karakteristik dewan direksi, karakteristik komite audit, dan kepemilikan

institusional terhadap pengungkapan ESG. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG, karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

Penelitian yang dilakukan oleh Kilincarslan *et al.*, (2020) mengenai pengaruh Struktur tata kelola terhadap pengungkapan lingkungan. Objek penelitian ini adalah perusahaan public dari 11 negara di MEA. Hasil penelitian menunjukkan indeks kualitas tata kelola, komite audit, dualitas CEO, presentasi dewan wanita, dan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan independensi dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian oleh Bae *et al.*, (2018) mengenai pengaruh tata kelola terhadap pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan publik di Asia Selatan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan saham asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan, dan independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan perusahaan sedangkan kepemilikan saham oleh direktur berpengaruh negatif terhadap pengungkapan keberlanjutan.

Penelitian oleh Arif *et al.*, (2020) mengenai pengaruh ukuran komite audit dan independensi komite audit terhadap pengungkapan ESG. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi di Australia. Hasil penelitian menunjukkan

ukuran komite audit dan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

Penelitian oleh Setyawan *et al.*, (2018) mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Objek penelitian ini adalah perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Singal dan Putra (2019) mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Objek penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erawati dan Sari (2021)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan,	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Manajerial	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap

		Manajemen Laba, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR	2. Ukuran Perusahaan 3. Manajemen Laba 4. Komite Audit Variabel Dependen: <i>Corporate Social Responsibility</i>	pengungkapan CSR 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 3. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 4. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR
2.	Jia <i>et al.</i> , (2022)	<i>Institutional Shareholders and Firm ESG Performance Evidence from China</i>	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: Kinerja ESG	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja ESG.
3.	(Jimantoro <i>et al.</i> , 2023)	Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i>	Variabel Independen: 1. Karakteristik Dewan Direksi 2. Karakteristik Komite Audit 3. Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i>	1. Karakteristik dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i> 2. Karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i> 3. Kepemilikan institusional

				berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i>
4.	Kilincarslan <i>et al.</i> , (2020)	<i>Impact of Governance Structures on Environmental Disclosures in the Middle East and Africa</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberagaman gender di dewan 2. Ukuran dewan 3. Independensi dewan 4. Dualitas CEO 5. Ukuran komite audit <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberagaman gender di dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 2. Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 3. Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 4. Keberagaman gender di dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 5. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 6. Independensi dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.
5.	Bae <i>et al.</i> , (2018)	<i>A Cross-Country Investigation of</i>	Variabel Independen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan saham asing berpengaruh

		<i>Corporate Governance and Corporate Sustainability Disclosure: A Signaling Theory Perspective</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang saham asing 2. Pemegang saham institusional 3. Independensi dewan 4. Ukuran dewan 5. Pemegang saham direktur <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Keberlanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. positif terhadap pengungkapan keberlanjutan 2. Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan 3. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan 4. Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan 5. Kepemilikan saham direktur berpengaruh negatif terhadap pengungkapan keberlanjutan
6.	Arif <i>et al.</i> , (2020)	<i>The Impact of Audit Committee Attributes on the Quality of Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosures</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Komite Audit 2. Independensi Komite Audit <p>Variabel Dependen: Pengungkapan ESG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG 2. Independensi Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG
7.	Setyawan <i>et al.</i> , (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

		Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Pada Perusahaan Non Perbankan dan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	3. Komisaris Independen Variabel Dependen: Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	2. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan
8.	Singal & Putra (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Variabel Independen: 4. Kepemilikan Institusional 5. Kepemilikan Manajerial 6. Kepemilikan Asing Variabel Dependen: <i>Corporate Social Responsibility</i>	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 3. Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis perlu dikembangkan dengan teori yang berhubungan, penjelasan yang logis dan menggunakan hasil penelitian terdahulu (Hartono, 2017). Pada penelitian ini terdapat tiga (3) hipotesis yang diajukan, yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ESG, pengaruh kepemilikan

manajerial terhadap pengungkapan ESG, dan pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ESG.

2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi seperti reksadana, asuransi, institusi keuangan dan sekuritas lainnya (Pirzada *et al.*, 2015). Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual karena ada pendapat bahwa investor institusional sebagai investor yang berpengalaman (Marsinah, 2021). Investor institusional akan lebih fokus pada laba di masa depan daripada sekarang, sehingga pemilik institusional akan memperhatikan keberlanjutan perusahaan. Institusional dianggap pemangku kepentingan yang kuat karena mereka umumnya memegang saham besar, dan dengan demikian, memiliki hak suara yang besar.

Teori legitimasi menunjukkan perusahaan yang berfokus pada masyarakat, pemerintah dan sosial (Chariri dan Ghazali, 2007). Dengan pengungkapan ESG secara tidak langsung perusahaan mementingkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat sehingga perusahaan menjadi dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat ini penting untuk keberlangsungan perusahaan, maka kepemilikan institusional yang mementingkan kepentingan jangka panjang perusahaan (laba masa depan) akan menekan manajemen untuk melaksanakan serta mengungkapkan ESG. Kaitannya dengan teori pemangku kepentingan, kepemilikan institusional sebagai pihak yang memonitor manajemen akan menghalangi perilaku manajemen yang lebih mengutamakan kepentingan

sebagian kecil *stakeholder*. Maka semakin besar kepemilikan institusional akan memengaruhi banyaknya pengungkapan informasi dari manajemen. Salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan stakeholder adalah penerapan dan pengungkapan ESG. Kepemilikan institusional memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang seperti laba di masa depan dalam perusahaan sehingga mereka akan mementingkan hubungan dengan masyarakat serta pemangku kepentingan sebagai faktor non keuangan dengan pelaporan ESG untuk keberlangsungan perusahaan.

Teori ini didukung oleh penelitian Jia *et al.*, (2022) dan Jimantoro *et al.*, (2023) yang menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Penelitian oleh Bae *et al.*, (2018) membuktikan pemegang saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H_{A1} : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan ESG

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yaitu dewan direksi dan dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Wahidawati, 2002). Manajer dalam perusahaan cenderung akan berhati-hati dan memperhatikan keputusan yang mereka buat karena mereka akan merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang mereka ambil. Manajerial dalam perusahaan akan termotivasi untuk semakin

meningkatkan kinerja perusahaan dan *image* perusahaan didepan publik karena berkaitan langsung dengan kepentingan mereka.

Menurut teori legitimasi, manajer akan melakukan dan mengungkapkan ESG untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga agar perusahaan memiliki *image* yang baik di masyarakat. Selain itu kaitannya dengan teori *stakeholder* perusahaan beroperasi tidak hanya untuk keuntungan sendiri melainkan harus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah manajer perusahaan memberikan informasi mengenai kinerja dan aktivitas perusahaan. Kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat dapat didapatkan dengan pengungkapan informasi seperti pelaksanaan ESG. Setelah perusahaan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, hal tersebut dapat mempengaruhi harga saham dari perusahaan, kemudian kepemilikan manajerial yang memiliki saham di perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari pengungkapan ESG berupa *capital gain*. Maka semakin besar kepemilikan manajerial, untuk kepentingan mereka sendiri akan meningkatkan implementasi dan pengungkapan ESG.

Teori ini didukung oleh penelitian oleh Singal and Putra (2019) dan penelitian Erawati dan Sari (2021) yang menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka dari itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H_{A2} : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan ESG

2.7.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan ESG

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota lainnya yang berasal dari luar emiten. Komite audit adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Independensi adalah sikap terbebas dari pengaruh pihak lain maupun ketergantungan dengan pihak lain (Mulyadi, 2014). Karena orang yang independen lebih cenderung bersikap adil, tidak memihak, dan objektif dalam menyelesaikan suatu masalah, maka komite audit dibentuk dalam organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan objektivitas dalam laporan serta memberikan rekomendasi penyusunan laporan dapat disampaikan oleh komite audit.

Menurut teori legitimasi, komite audit akan memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya sesuai dengan norma dan peraturan masyarakat dengan penerapan dan pengungkapan ESG. Semakin banyak komite audit maka pengawasan terhadap manajemen untuk bertindak sesuai norma dan peraturan masyarakat akan semakin besar sehingga pengungkapan dan pelaksanaan ESG akan semakin besar. Berkaitan dengan teori *stakeholder*, dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham juga posisinya sebagai komite audit akan melakukan pengawasan terhadap manajemen agar dapat memenuhi tuntutan dan harapan dari *stakeholder*. Tuntutan dari *stakeholder* salah satunya adalah

pengungkapan informasi yang kredibel seperti praktik pengungkapan lingkungan dan sosial perusahaan (Suhardjanto dan Permatasari, 2010). Selain melakukan pengawasan terhadap pengungkapan informasi lingkungan dan sosial, komite audit juga efektif untuk memberikan rekomendasi terkait praktik keberlanjutan atau pelaporan ESG yang baik di perusahaan

Teori ini didukung oleh penelitian Arif *et al.*, (2020) dan Buallay & Al-Ajmi (2020) yang menunjukkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Penelitian oleh Kilincarslan *et al.*, (2020) juga membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{A3} : Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan ESG